

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
TAHUN 2022**



**BUKU I**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR  
2023**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	.....i
Lembar Pernyataan	.....ii
Kata Pengantar	.....iii
Daftar Isi	.....iv
A Profil dan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	.....1
B Tataguna Lahan	.....2
C Kualitas Air	.....4
D Kualitas Udara	.....5
E Resiko Bencana	.....6
F Perkotaan	.....7
G Tata Kelola	.....8
H Penghargaan Lingkungan	.....11
I Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	.....11
J Tindak Lanjut Pengelolaan	.....13



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Karanganyar 2022 yang disusun pada tahun 2023 memuat gambaran 6 kondisi lingkungan : tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola dengan pendekatan kajian DPSIR (driving force, pressure, state, impact dan response). DIKPLHD memuat isu prioritas tahunan yang ditetapkan melalui proses partisipatif dan konsultatif seluruh stakeholder lingkungan pada Rabu 14 Juni 2023 yang dieksekusi dengan pendekatan skoring. Penyusunan DIKPLHD telah mengikuti pedoman penyusunan tahun 2023 dari Pusat data dan Informasi Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dokumen ini juga disusun untuk memenuhi regulasi pada pasal 480 (c) dan 484 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021 serta sebagai wujud keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, khususnya aktualisasi kondisi lingkungan.

### **A. Profil dan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar**

Kabupaten Karanganyar mendapat berkah dan tantangan dari keberagaman lingkungan dan kondisi geografis. Keberagaman lingkungan terutama karena perbedaan lanskap yang berkontribusi pada kekayaan habitat, kekayaan sumber daya genetik, sumber daya alam hingga jasa lingkungan. Keragaman berasal pula dari variabilitas penggunaan lahan dari kawasan urban hingga rural dengan kekhasan aktivitas antropogenik masing-masing. Tantangan kondisi tersebut adalah kompleksitas masalah akibat pemanfaatan antropogenik maupun kondisi natural yang rawan bencana.

Kabupaten Karanganyar memiliki 17 kecamatan dengan didominasi oleh lahan kering (74,06%) dan penggunaan sebagai lahan sawah 20.069 ha (25,93%). Keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 adalah 947.642 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada 2017-



2022 adalah 1,46%. Kabupaten Karanganyar berciri agraris dengan tantangan pada ekspansi lahan sebagai kompensasi populasi dan penyediaan ruang antropogenik moden.

Kabupaten Karanganyar merupakan bagian Subosukawonosraten sebagai kawasan hinterland Kota Surakarta. Beberapa kecamatan seperti Colomadu, Jaten dan Gondangrejo menjadi wilayah peri urban dengan dua kecamatan pertama menjadi kawasan aglomerasi. Kondisi tersebut memberi tekanan masalah lingkungan. Perubahan tataguna lahan menjadi salah satu masalah lingkungan berdampak pada reduksi lahan terbuka dan perubahan corak sosiokultural dari agraris menjadi urban.

Hasil evaluasi berbasis perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2022 mengindikasikan kondisi sedang (nilai 62,32). Angka IKLH Kabupaten Karanganyar cenderung dinamis pada 2016-2022. Permasalahan lingkungan menimbulkan kecenderungan sedikit penurunan nilai IKLH ( $r^2 : 0,0637$ ). Penetapan isu prioritas DIKPLHD 2023 secara partisipatif menetapkan 3 isu yaitu : (a) Penurunan Kualitas Air Sungai, (b) Masalah Pengelolaan Sampah, (c) Persepsi Budaya Lingkungan.

## **B. Tataguna Lahan**

Faktor driving force (pemicu) permasalahan lahan adalah pertumbuhan populasi. Pressure terhadap tataguna lahan adalah aglomerasi, ekspansi kawasan antropogenik urban dan potensi sumber daya alam. Kecenderungan kepadatan menurun pada Colomadu dan Jaten yang mengindikasikan ketersediaan lahan pemukiman mulai terbatas sebagai dampak pressure sebagai kawasan aglomerasi. Kawasan lain seperti Kecamatan Tawangmangu, Kebakkramat dan Mojogedang menunjukkan peningkatan penduduk signifikan sebagai pengembangan lahan urban ( $0,8775 < r^2 < 0,9435$ ).

Kabupaten Karanganyar, terutama kawasan hutan Gunung Lawu, menjadi habitat beragam fauna endemik dan langka seperti Jalak Lawu (*Turdus sp*), Elang ular Bido (*Spilornis cheela*), Macan Tutul (*Panthera pardus*), Monyet



ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) hingga Landak (*Hystrix javanica*). Kabupaten Karanganyar juga memiliki ragam sumber daya genetik flora seperti Durian Sukun (*Durio zibethinus*) dan Duku Matesih (*Lansium parasiticum*) serta ragam biofarmaka bernilai penting dan khas di Jawa Tengah seperti Pulesari (*Alyxia sp*), Otot ototan (*Plantago sp*), Sambiloto (*Andrographis paniculate*), Kapulaga (*Amomum compactum*) dan Kayumanis (*Cinnamomum burmanii*).

Mayoritas lahan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh agrikultur dan hutan. Perubahan lahan sawah menjadi non sawah banyak terjadi karena aglomerasi terutama di Kecamatan Colomadu, Jaten dan Gondangrejo. Kawasan tersebut merupakan wilayah peri urban (WPU) yang menjadi wilayah penyangga sekaligus perluasan kawasan urban Kota Surakarta. Alih fungsi juga terjadi di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso dan Karangpandan didorong penyediaan lahan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merespon tantangan pada tataguna lahan melalui perilisan regulasi, konservasi fungsi ekosistem melalui pendekatan partisipatif dan pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung. Pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung telah termuat dalam KLHS RPJM yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPJMD Karanganyar 2018-2023 serta penyempurnaan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah (Perda) No 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur kawasan konservasi terutama untuk melindungi kawasan bawahannya (resapan air dan hutan lindung) serta kawasan lindung geologi untuk mitigasi bencana longsor dan cagar geologi. Upaya konservasi dilakukan bekerjasama dengan instansi serta masyarakat melalui penghijauan kawasan dan pemeliharaan mata air. Kerjasama penghijauan dan reboisasi dengan CDK X Surakarta bersama masyarakat serta OISCA (Children dan People Forest) pada tahun 2020 mampu menanam hingga 70.000 batang pohon.



Kabupaten Karanganyar masih memiliki lahan terbuka bervegetasi yang cukup luas. Ketersediaan tersebut memberikan potensi jasa regulasi pada penyediaan serapan karbon natural. Hasil analisis dan perhitungan GPP menunjukkan kemampuan vegetasi di kabupaten Karanganyar dalam menyerap karbon mencapai 376811,46 gC/m<sup>2</sup>/hari. Ragam habitat di Kabupaten Karanganyar menjadi rumah bagi spesies penting seperti Duku Matesih (*Lansium parasiticum*), Durian Sukun, Jalak Lawu (*Turdus* sp), Nagasari (*Messua ferrea*) hingga jenis endemik seperti Manis javanica (*Trenggiling*), *Muntiacus muntjak* (Kijang) hingga *Spilornis cheela* (Elang Ular Bido).

### **C. Kualitas Air**

Potensi tersebut didukung oleh irisan 6 Sub DAS utama (Sub DAS Keduang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan dan Sub DAS Pepe), keberadaan Cadangan Air Tanah (CAT) Boyolali Karanganyar dan letak geografis pada lereng Gunung Lawu. Driving force kualitas air adalah aktivitas dan intervensi antropogenik. Driving force utama tersebut mendorong faktor lain berupa peningkatan pembuangan limbah (industri, domestik dan pertanian) pada badan air. Pressure masalah kualitas air mencakup : tren aktivitas produksi limbah meningkat, rebound effect pandemi, keterbatasan fasilitas IPAL dan SPAL komunal serta kepedulian masyarakat masih rendah.

Permasalahan pembuangan limbah cair menjadi penentu kondisi kualitas air. Indeks kualitas air (IKA) berdasarkan data verifikasi menunjukkan nilai **55,71** mengindikasikan kondisi **sedang**. Klasifikasi status pencemaran berdasarkan nilai indeks pencemaran menunjukkan dominasi cemaran ringan pada titik sampel (66%). Situasi positif adalah masih diperoleh 31% titik sampel dengan status pencemaran memenuhi. Hasil pemantauan menunjukkan variabel dengan kekerapan pelampauan baku mutu kualitas air tertinggi adalah fecal coliform (65,7%). Variabel dengan persentase pelampauan tertinggi berikutnya adalah biological oxygen demand (BOD),



fosfat dan total suspended solid (TSS) sebagai indikasi pencemaran bahan organik.

Kondisi serupa terjadi pada pengujian air sumur. Hanya hasil pada sampel sumur Gondangrejo yang memenuhi syarat air bersih sekaligus air konsumsi. Kondisi ini patut diwaspadai mempertimbangkan bahwa separuh masyarakat Kabupaten Karanganyar masih mengandalkan air tanah sebagai air baku atau konsumsi. Situasi positif masih dapat ditemukan pada pengujian kualitas mata air yang memenuhi syarat air bersih maupun konsumsi. Kondisi badan air buatan seperti waduk dan embung lebih terancam pada kapasitas operasional akibat sedimentasi.

Respon terhadap upaya pengelolaan kualitas air dilakukan via pendekatan tata kelola, konsistensi dan peningkatan monitoring-evaluasi serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kawasan yang telah mencapai 100% Open Defecation Free (ODF). Hal tersebut tercapai melalui sinergi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tata kelola kualitas air dilakukan pula melalui perilisan regulasi. Regulasi tersebut antara lain : Perda No 6 Tahun 2011 tentang "Pengelolaan Air Tanah", Perda No 10 Tahun 2012 tentang "Pengelolaan Air Limbah" dan Perda No 8 Tahun 2017 tentang "Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan". Pendekatan pemeliharaan juga dilakukan melalui penggiatan penanaman vegetasi sebagai filter awal kualitas air.

#### **D. Kualitas Udara**

Permasalahan kualitas udara belum terjadi signifikan dan cenderung terlokalisasi pada kawasan urban dan aglomerasi di Kabupaten Karanganyar. Ragam dan intensitas kegiatan manusia menentukan kondisi kualitas udara tersebut. Driving force kualitas udara adalah ketidakseimbangan antara emisi dan pengendali terutama pada kawasan urban. Pressure kualitas udara di Kabupaten Karanganyar akan didorong oleh faktor aglomerasi, ketergantungan pada moda pribadi dan bahan bakar fosil serta persepsi lingkungan dan kesiapan mitigasi-adaptasi masyarakat.



Hasil perhitungan IKU Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 memunculkan nilai 81,10 mengindikasikan kondisi baik. Hasil parameter uji menunjukkan nilai di bawah ambang baku mutu untuk seluruh lokasi. Hal ini menunjukkan aktivitas antropogenik belum memberi dampak signifikan pada kualitas udara sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar. Hasil perhitungan IKU mendapatkan nilai terendah pada kawasan transportasi (78,87). Variabel NO<sub>2</sub> memiliki nilai rata-ran lebih besar dibandingkan SO<sub>2</sub> pada pengujian udara ambien (14,51 µg/Nm<sup>3</sup> dibandingkan 10,35 µg/Nm<sup>3</sup>). Hal ini menunjukkan bahwa emisi dari penggunaan bahan bakar cair lebih dominan dibandingkan bahan bakar padat

Respon pengelolaan kualitas udara dilakukan melalui perilsan Perda No 19 tahun 2019 terkait RTRW secara khusus pada penyediaan ruang terbuka hijau publik maupun privat. Upaya pengendalian emisi dilakukan pula melalui kegiatan uji udara ambien secara rutin meski perlu dilengkapi inventarisasi emisi untuk memenuhi penetapan wilayah pengelolaan udara sesuai PP 22 Tahun 2021. Otoritas setempat berupaya membangun kawasan strategis dengan harmoni ruang terbuka hijau melalui pembangunan koridor kota hijau, taman kota, taman vertikal dan node garden. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program unggulan penanaman pohon massal "Ijo Royo Royo" yang telah berlangsung selama 8 tahun. Pemkab Karanganyar juga menyelenggarakan Car Free Day pada jalur utama setiap minggu pagi untuk mengkampanyekan pemanfaatan jalan raya untuk kegiatan non transportasi bermotor. Respon lain adalah dengan penyediaan dan rencana perluasan layanan transportasi publik melalui kerjasama operasional Batik Solo Trans (BST) dengan Pemerintah Kota Surakarta.

### **E. Resiko Bencana**

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa kawasan yang memiliki daya dukung terbatas terhadap kebencanaan (hanya 1,94% wilayah memiliki daya dukung tinggi). Driving force kebencanaan adalah kondisi natural





bentang lahan setempat dan aktivitas antropogenik yang potensial memicu bencana. Faktor pressure adalah kondisi natural berhadapan dengan ragam kepentingan pengembangan seperti pariwisata, agrikultur hingga pemukiman. Pressure berikut adalah kesiapan mitigasi dan tanggap darurat bencana yang merata pada seluruh kawasan.

Data tahun 2022 menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar semakin rentan bencana. Tiga bencana utama pada 2022 adalah tanah longsor, puting beliung dan banjir. Tanah longsor merupakan jenis bencana dengan kekerapan tinggi (69%) terutama pada kawasan lereng Gunung Lawu. Bencana terutama longsor mengakibatkan kerugian material, menyebabkan korban meninggal 2 jiwa dan 4 jiwa harus mengungsi, kerusakan infrastruktur hingga kerusakan bentang lahan.

Respon utama Pemkab Karanganyar dalam mitigasi bencana adalah dengan menjadikan sebagai isu penting dan strategis dalam RPJMD 2018-2023. Upaya mengurangi kerentanan bencana menjadi salah satu bagian visi "Memajukan Karanganyar". Hal ini didukung aspek hukum melalui rilis Peraturan Daerah No 23 tahun 2015. Peraturan Daerah RTRW telah memetakan kawasan rawan multibencana sekaligus jalur evakuasi longsor maupun banjir.

Respon dilakukan pula dengan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan tangguh bencana. Desa Tangguh Bencana (Destan) merupakan salah satu program unggulan yang pada tahun 2020 terbentuk 3 Destana kategori pratama yaitu di Desa Nglegok, Desa Karang Sari dan Desa Menjing. Partisipasi masyarakat dalam penurunan resiko bencana turut terfasilitasi oleh lembaga swadaya bertaraf lokal (Anak Gunung Lawu) maupun internasional (OISCA) melalui kegiatan langsung dalam tanggap darurat dan penanaman pohon untuk pencegahan bencana longsor.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan aplikasi ipteks modern dalam upaya penguatan tanggap bencana. Salah satunya melalui implementasi early warning system (EWS) longsor. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan bantuan 5 unit EWS dari PSB UNS yang akan ditempatkan di 3 kecamatan yaitu Ngargoyoso, Tawangmangu dan



Karangpandan. Kampanye tangguh bencana juga dilakukan dengan pendekatan teknologi informasi modern melalui optimalisasi website BPBD Kabupaten Karanganyar.

### **F. Perkotaan**

Kota merupakan kawasan dengan masalah lingkungan kompleks. Driving force masalah perkotaan adalah kepadatan populasi. Pressure masalah perkotaan Kabupaten Karanganyar meliputi level konsumsi tinggi, keterbatasan akses layanan, kebutuhan ekspansi ruang perkotaan dan konflik sosial. Masalah lingkungan urban di Kabupaten Karanganyar terjadi di pusat pemerintahan dan kawasan aglomerasi.

Pengelolaan limbah menjadi masalah khas perkotaan. Limbah domestik terutama kategori black water sudah teratasi dengan tercapainya Open Defecation Free. Masalah utama lebih pada pengelolaan sampah karena keterbatasan cakupan layanan pengambilan (24,49% pada tahun 2022), keterbatasan tempat fasilitas tempat pembuangan sementara (hanya ada pada 8 kecamatan) dan kapasitas tempat pembuangan akhir Sukosari (sudah mencapai 70%). Total produksi sampah Kabupaten Karanganyar pada 2022 mencapai 397051,9 ton/tahun atau setara dengan 1087.813 ton/hari. Pertumbuhan sampah kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan signifikan pada periode 2017-2022 ( $r^2 : 0,979$ ). Pengelolaan sampah di TPA Sukosari sendiri saat ini telah menerapkan controlled landfill. Untuk kesehatan, berdasarkan jenis penyakit utama pada 2022 didominasi permasalahan saluran pencernaan (74,59%) dan infeksi saluran pernafasan akut. Fasilitas kesehatan relatif mudah ditemukan di kawasan urban (pusat pemerintahan dan aglomerasi), namun secara keseluruhan membutuhkan penambahan karena rasio layanan yang terlampau besar.

Industri menjadi salah satu sumber limbah dan sampah potensial. Data DLH Kabupaten Karanganyar 2021 menunjukkan total luasan sumber limbah mencapai 166,59 ha. Industri di Karanganyar menghasilkan limbah padat (non B3 dan B3) sebagai jenis terbesar. Limbah padat non B3 memproduksi



hingga 6,36 ton/hari dan padat B3 hingga 164,175 ton/hari. Limbah cair non B3 dihasilkan mencapai 20 m<sup>3</sup>/hari sedangkan limbah cair B3 mencapai 3055,045 m<sup>3</sup>/hari. Sejumlah 55,38% kegiatan (industri maupun jasa medis) di kabupaten Karanganyar menghasilkan limbah B3 yang tentu saja perlu pendataan dan pengawasan lebih intensif untuk menekan resiko terhadap lingkungan.

Dampak dari masalah perkotaan yang muncul antara lain adalah penumpukan sampah pada TPS. Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan estetika dan kesehatan lingkungan. Limbah domestik terindikasi juga masih mencemari badan air karena keterbatasan IPAL dan SPAL sehingga mengakibatkan degradasi kualitas air sungai.

Respon Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait masalah persampahan antara lain melalui perilisan regulasi Perda No 16 tahun 2010 tentang "Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan". Pemkab juga menargetkan penambahan cakupan layanan pengambilan sampah sekaligus TPS (meningkat 6,43% pada periode 2017-2019). Penumpukan sampah di TPA Sukosari direncanakan diatasi melalui perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Terkait air limbah, pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Perda No 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kampanye pemilahan sejak hulu via bank sampah di komunitas masyarakat dan rumah sampah di lokasi TPA Sukosari.

### **G. Tata Kelola**

Tata kelola merupakan elemen perajut sinergi tiga pilar pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi). Driving force bagi tata kelola lingkungan di Kabupaten Karanganyar adalah arah dan tujuan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian didorong menjadi sebuah masalah lingkungan oleh beberapa faktor seperti cakupan wilayah kelola



yang luas, kekayaan potensi alam dan jasa lingkungan, keterbatasan data dan partisipasi masyarakat dianggap masih kurang.

Kondisi pemanfaatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh jasa lingkungan dan wisata alam (terdapat 29 lokasi wisata alam dan jasa lingkungan). Banyak daerah yang mengembangkan potensi tersebut namun kurang mendapatkan arahan skema pengembangan dan evaluasi menuju keberlanjutan. Dampak kondisi tersebut adalah peningkatan ekonomi dengan disertai resiko penurunan fungsi lingkungan. Salah satu indikasinya tampak pada perubahan fungsi lahan di sentra wisata alam Kecamatan Tawangmangu dan Ngargoyoso.

Kewajiban pembuatan dokumen lingkungan untuk pemberian izin kegiatan merupakan ujung tombak respon tata kelola oleh Pemkab Karanganyar. Hal tersebut dilegalkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar No 8 tahun 2017. Respon untuk optimalisasi tata kelola lingkungan dilakukan pula melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan dokumen lingkungan. Sepanjang tahun 2021-2022, DLH Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 39 kegiatan pemantauan terhadap persetujuan lingkungan untuk segala jenis kategori dokumen. Seluruhnya dinyatakan telah tertib terhadap komitmen dalam persetujuan lingkungan. Terkait pengelolaan limbah B3, Pemkab Karanganyar telah merilis 32 izin. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola difasilitasi oleh keberadaan wahana aduan masalah lingkungan dan LSM lingkungan. Pada tahun 2020, DLH Kabupaten Karanganyar telah menindaklanjuti 23 aduan lingkungan terutama tentang pencemaran dan pengelolaan TPS. Seluruh aduan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Pada aspek anggaran dan sumber daya manusia (SDM) saat ini kondisi kedua hal tersebut telah memadai. Kabupaten Karanganyar memiliki pos anggaran tersendiri untuk pengelolaan lingkungan. Proporsi terbesar adalah pada upaya penanganan masalah persampahan. Pada SDM, saat ini mayoritas staf DLH Kabupaten Karanganyar telah memiliki pendidikan minimal SLTA (54%). DLH Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki 9



staf fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL) dengan 66,67% telah menjalani diklat pada tahun 2022.

Dana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2021 mencapai 6 milyar rupiah. Berdasarkan proporsi sebagian besar anggaran tersebut adalah untuk mengatasi masalah persampahan. Sejumlah 75,70% anggaran untuk pengelolaan sampah dan operasionalisasi TPA. Nilai anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun 2022 hanya mencapai 1,09% dari keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD).

### **H. Penghargaan Lingkungan**

Kabupaten Karanganyar telah memperoleh apresiasi dalam upaya pengelolaan lingkungan. Apresiasi tersebut diperoleh oleh pemerintah, perseorangan, komunitas masyarakat hingga akademisi. Penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun sektor swasta. Penghargaan pada tahun 2021 antara lain Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desa Wisata Awards untuk Desa Kemuning dari Bank BCA dan Merdeka Awards untuk Desa Sewurejo dari Kemendes PDTT. Pada tahun 2020, Bupati Karanganyar mendapatkan penghargaan Apresiasi Pembinaan PROKLIM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diikuti penghargaan 7 Desa PROKLIM Utama dan 6 Desa PROKLIM Madya. Salah satu penghargaan yang cukup menonjol adalah STBM Award (Kemenkes) dan Smart Sanitation Award (KemenPUPR) pada tahun 2018. Penghargaan tersebut berkenajutan dengan perolahan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award dari Bappenas pada tahun 2019.



**I. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Permasalahan ketersediaan air bersih yang semakin menipis, banyaknya sumber air dan sumur warga yang tercemar, jumlah air bersih di hulu yang semakin menipis, dan banyaknya pengguna sumur dalam adalah penyebab perlunya pengembangan system penyediaan air minum di Kabupaten Karanganyar.
2.	Pengelolaan sampah dengan Zero waste management ( <b>BUMdes Kelola Sampah</b> )	Pengelolaan sampah yang perlu diperbaiki dari mulai hulu (desa) hingga hilir (TPS) lewat kerja sama dari warga, pemerintah desa, maupun pihak ketiga.
3.	Digital Tourism di Kabupaten Karanganyar ( <b>SOBO Karanganyar</b> )	Inovasi ini sebagai solusi pemberdayaan ekonomi, pengembangan sistem informasi, dan pembayaran sector pariwisata agar digitalisasi pariwisata di Kabupaten Karanganyar semakin mudah, sebagai langkah mempromosikan wisata, kuliner, dan event-event melalui pendekatan digital.
4.	Children and People Forest Program	Mengajak anak-anak usia sekolah dan masyarakat untuk menanam pohon.
5.	Pengelolaan KHDTK untuk Tridharma Perguruan Tinggi	Pemanfaatan kawasan KHDTK sebagai kampus alam dan healing forest kerjasama UNS dengan Perhutani.
6.	SI DEMEN TOMAT TERASI (Deteksi Dini dan Pemantauan Tuberkulosis yang Memadukan dan Mengintegrasikan Antara Aplikasi)	Inovasi DEMEN TOMAT bertujuan untuk meningkatkan penemuan pasien TBC di Wilayah Kabupaten Karanganyar pada umumnya, sehingga dengan ditemukannya semua pasien TBC maka semuanya akan mendapatkan pengobatan.
7.	MARKAS REMAJA SEHAT "Marketing Kesehatan Remaja Sehat"	Kesehatan remaja di wilayah Kabupaten Karanganyar melalui media promosi kesehatan dengan emnggunakan media internet dengan prinsip dari remaja untuk remaja.
8.	KOL SEGAR (kolaborasi sekolah, tenaga ahli dan instansi terkait, alumni, dan orangtua)	Kol Segar menekankan kolaborasi yang memadukan manajemen sekolah dan manajemen universitas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis asset. "Kolaborasi yang dilakukan dengan memaksimalkan keahlian masing-masing mampu untuk mendongkrak perolehan prestasi sekolah.



9.	Kegiatan Pungut Sampah Serentak	Kegiatan bersama masyarakat untuk memungut sampah agar tertanam kepedulian menjaga lingkungan dari hal kecil.
10.	Teknologi Tepat Guna Peningkatan Kualitas Air	Pengujian terhadap 27 parameter kualitas air minum masyarakat sesuai Permenkes 492 tahun 2010 untuk diberikan solusi teknis sesuai dengan permasalahan (hasil uji).
11.	Inovasi teknologi Pengolahan IPAL	Pemanfaatan air IPAL dari limbah WC, air cucian serta air kamar mandi sebagai air baku pertanian dan peternakan.

### **J. Tindak Lanjut Pengelolaan**

Program pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi salah satu atensi Kabupaten Karanganyar. Aksi dan inovasi dilakukan demi pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Pelengkapan dan penyempurnaan adalah tindak lanjut pengelolaan berkelanjutan untuk optimalisasi hasil sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Berikut adalah langkah langkah tersebut:

1. Peningkatan dalam penyediaan data lingkungan krusial untuk dilakukan. Hal ini berperan dalam membantu penyusunan kajian lingkungan pemerintah maupun dokumen lingkungan swasta pada seri tahun. Kelengkapan data juga akan berperan penting dalam evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) maupun perencanaan TPB pada periode berikutnya yang akan menjadi ruh dalam penyusunan RPJMD.
2. Mendorong percepatan penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah dengan kombinasi terukur antara pendekatan ilmu pengetahuan teknologi sains (ipteks) dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengelolaan dari hulu.
3. Mendorong dan melaksanakan upaya peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dalam kaitan dengan 3 isu global yaitu perubahan iklim, pencemaran dan biodiversitas. Salah satu yang krusial adalah dalam pengelolaan sumber daya air tawar.
4. Melakukan adaptasi dan implementasi terutama terkait penilaian terhadap dokumen lingkungan dengan berbasis resiko (risk based)



INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
**KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

bukan sekedar lisensi berdasar dampak (licensing impact based)  
sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 untuk





memberikan paradigma preventif (bukan responsif) pada pengelolaan lingkungan.

5. Optimalisasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi modern (melalui internet dan gadget) untuk program-program lingkungan seperti pelaporan masalah lingkungan, pelaporan dan peringatan kebencanaan, updating iklim dan cuaca, kampanye program lingkungan, transparansi hasil pemantauan atau uji kualitas matra lingkungan serta pembentukan forum-forum peduli lingkungan yang berbasis online. Hal tersebut sebagai wujud transparansi informasi dan mendorong peranserta publik dalam pengelolaan lingkungan. Basis data dan forum online akan membantu mengatasi masalah luas cakupan wilayah dan komunikasi pada masa pandemi.
6. Melakukan penggiatan terhadap upaya monitoring dan evaluasi lingkungan. Penggiatan dapat bermakna pada peningkatan aktivitas, penambahan lokasi-lokasi pantauan dan pelengkapan pada variabel pemantauan. Hal ini akan membantu evaluasi mencapai hasil lebih obyektif dan memberikan deskripsi lebih lengkap pada permasalahan lingkungan yang dihadapi.
7. Penegakan hukum terhadap regulasi yang telah ditetapkan wajib untuk ditegaskan dan didisiplinkan. Hal ini untuk mencegah permasalahan lingkungan berlarut larut terutama terkait alih fungsi lahan di kawasan aglomerasi dan kawasan sentra pariwisata serta pencemaran lingkungan oleh aktivitas antropogenik.
8. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan mitigas bencana. Upaya membangun PLTSa dapat menjadi solusi menangani tumpukan sampah meski perlu diimbangi dengan penambahan armada pengambilan sampah, pembangunan TPS strategis berbasis pada produksi sampah dan jarak wilayah bukan ketersebaran pada kecamatan serta peningkatan kapasitas pengelolaan sampah sejak



- hulu. Pendekatan efektivitas dipandang akan lebih berdampak pada peningkatan upaya pengelolaan sampah daripada sekedar efisiensi.
9. Optimalisasi kerjasama dengan kelompok akademis dengan memanfaatkan ketersediaan maupun keberadaan berbagai perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Karanganyar. Kerjasama tersebut akan memberi manfaat pada transfer ipteks maupun partisipasi secara langsung dalam pengelolaan kawasan atau perbaikan lingkungan.
  10. Mendorong pelaksanaan kegiatan berkelanjutan pada sektor pariwisata (ecotourism) dan pertanian (green agriculture) untuk harmonisasi pengembangan potensi lokal dengan upaya konservasi lingkungan.
  11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberdayakan diri dalam pengelolaan lingkungan melalui metode-metode yang mudah untuk diterima serta menarik bagi masyarakat seperti pemberian insentif pada desa ramah lingkungan maupun penghargaan layak pada inovasi pengelolaan lingkungan dari masyarakat.
  12. Membantu promosi kearifan lokal terutama terkait pengelolaan lingkungan hidup. Promosi tersebut akan turut membantu meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal, mengelola lingkungan serta dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata.